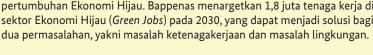




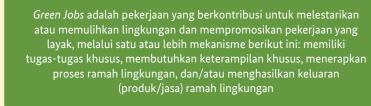


PENGUATAN REGULASI PENGEMBANGAN GREEN JOBS **BERBASIS EKONOMI HIJAU**

Perubahan iklim mendorong manusia untuk beradaptasi dengan mengusung pertumbuhan Ekonomi Hijau. Bappenas menargetkan 1,8 juta tenaga kerja di sektor Ekonomi Hijau (Green Jobs) pada 2030, yang dapat menjadi solusi bagi









Regulasi tentang Green Jobs di Indonesia sangat penting untuk menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan implementasi terkait Green Jobs di Indonesia.

APA URGENSI REGULASI TENTANG PENGEMBANGAN GREEN JOBS?



Sebagai komitmen Indonesia terkait Ekonomi Hijau, Sustainable Development Goals (SDGs), Transisi Energi dan Pengembangan Green



Untuk mendukung pengembangan Green Jobs.



Regulasi sebagai instrumen kebijakan.



Integrasi pelibatan Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.



MENGAPA "PERATURAN PRESIDEN" (PERPRES)?



Peraturan Presiden merupakan alternatif terbaik dibandingkan bentuk pengaturan lain karena dapat menjadi sumber hukum yang kuat, yang dapat dibentuk berdasarkan mandat dari peraturan perundang-undangan di atasnya.



Regulasi ini juga dapat menjadi bagian dari kewenangan Presiden dalam menjalankan Pemerintahan, yang bersifat mandiri.

LANGKAH APA YANG PERLU DILAKUKAN?

Penyiapan Naskah Urgensi

Penyiapan Draft Perpres

Pembahasan antar Kementerian/ Lembaga terkait

Penetapan Kementerian/ Lembaga pemrakarsa

Pemrakarsa mengajukan kepada Presiden untuk dibahas

Konsultasi Publik yang bersifat Inklusif dan Substantif

Persiapan implementasi

Persetujuan dalam Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet

¹ Diusulkan oleh Bappenas berdasarkan Studi Definisi dan Peta Okupasi Green Jobs oleh Proyek ISED, Oktober 2021 – Juli 2022